

Dr.Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

M. Farid Wajdi, S.Si., S.IPL., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum

Zulfitri, S.Ag., M.A.

Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.



PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI

Perspektif Organisasi dan Regulasi

Penulis :

Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum
Zulfitri, S.Ag., M.A.
Muhammad Farid Wajdi, S.Si., S.IPI., M.Hum

Editor : Andi Saputra, S.Kom., M.Kom.

Desain
Arielaksita

Cetakan I Juni 2024

Diterbitkan oleh
Yayasan Laksita Indonesia
Anggota IKAPI
KSB Kelapa Gading Blok AJ 23-24 Kota Serang Banten 42122
Ph : 081292652034/081284504441
<https://laksitaindonesia.site>
Email : laksitaindonesia@gmail.com

Jamridafrizal, Zulfitri, Muhammad Farid Wajdi
Perpustakaan Sebagai Institusi :
Perspektif Organisasi Dan Regulasi
Cet. 1 – Laksita Indonesia, 2024 212 hlm, 17 x 25 cm
ISBN 978-602-5749-26-1

Dilarang keras memproduksi sebagian atau seluruh isi buku ini, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, serta menjualbelikannya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

@HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Sekapur Sirih

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah kebenaran. Berkat rahmat Allah, Sang Pemilik Ilmu, karya sederhana ini dapat terwujud setelah melewati masa yang tak terhitung lamanya.

Perpustakaan, sebagai institusi yang berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa perpustakaan harus dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan berkontribusi pada pembangunan nasional.

Namun, data menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum di Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 10,4 juta orang, jauh di bawah potensi pengguna yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk meningkatkan minat baca dan kunjungan ke perpustakaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat perpustakaan. Banyak masyarakat yang masih memandang perpustakaan sebagai tempat penyimpanan buku yang membosankan dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menarik, menyenangkan, dan bermanfaat bagi semua kalangan.

Selain itu, perpustakaan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Perpustakaan harus menyediakan koleksi yang beragam dan relevan, serta layanan yang inovatif dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan perpustakaan.

Peningkatan pemanfaatan perpustakaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pengelola perpustakaan semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu menyadari bahwa perpustakaan adalah milik mereka dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat belajar dan pengembangan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, buku ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang perpustakaan sebagai institusi yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi tantangan era digital. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi

strategi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh perpustakaan untuk tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sebagaimana pepatah Melayu mengatakan, 'Tak ada gading yang tak retak. ' Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, baik secara tertulis maupun lisan, demi perbaikan buku ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pencinta ilmu perpustakaan dan informasi, serta semua pihak yang senantiasa mencari ilmu pengetahuan.

Serang, Juli 2024

Penulis



13.

Perpustakaan Sekolah dan Madrasah

Di Indonesia, perpustakaan sekolah dan madrasah merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, yang menggarisbawahi peran perpustakaan sekolah dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan literasi siswa.

6.1 Pengertian Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 angka 11, perpustakaan sekolah/madrasah adalah: perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

Definisi ini menekankan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah bukan hanya sekadar tempat menyimpan buku, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Perpustakaan ini berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai materi dan informasi untuk mendukung siswa dan guru dalam mencapai tujuan pendidikan.

Sebagai pusat sumber belajar, perpustakaan sekolah/madrasah memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan buku teks pelajaran, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya seperti buku referensi, jurnal, majalah, koran, film, rekaman audio, dan materi digital. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan akses internet dan komputer yang dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk mencari informasi dan melakukan penelitian.

Dengan demikian, perpustakaan sekolah/madrasah dapat menjadi tempat yang menyenangkan dan inspiratif bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan diri. Perpustakaan juga dapat menjadi tempat bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Oleh karena itu, penting bagi sekolah/madrasah untuk memiliki perpustakaan yang baik dan dikelola dengan baik.

6.2 Peran Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Perpustakaan sekolah dan madrasah memainkan peran krusial dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Tidak hanya menyediakan sumber daya seperti buku dan jurnal, perpustakaan juga memfasilitasi pengembangan keterampilan

literasi informasi siswa, seperti yang ditegaskan oleh penelitian Kuhlthau, Maniotes, dan Caspari (2015).²⁸¹

Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah/madrasah dari 113. 541 pada tahun 2018 menjadi 140. 643 pada Juni 2023 (Nasional, P. 2020) mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap akses pendidikan yang merata. Namun, tantangan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan koleksi tetap ada.

Sensus perpustakaan tahun 2018 memberikan data berharga untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam hal akses pendidikan. Data ini dapat digunakan untuk merancang strategi perluasan jangkauan perpustakaan, penguatan koleksi, dan peningkatan fasilitas serta program pendukung lainnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, perpustakaan sekolah/madrasah dapat terus ditingkatkan untuk memastikan setiap siswa di Indonesia memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan membantu mewujudkan potensi penuh generasi muda Indonesia dan meningkatkan literasi di tingkat sekolah.

6.3 Sejarah Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1920-an, diinisiasi oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Volkslectuur. Koleksi perpustakaan saat itu didominasi oleh buku-buku terbitan Volkslectuur dan dikelola oleh guru. Uniknya, perpustakaan ini juga melayani masyarakat umum dengan sistem peminjaman berbayar. (Basuki, 1994)²⁸²

Masa penjajahan Jepang menandai periode stagnasi bagi perpustakaan sekolah. Tidak ada catatan mengenai perkembangannya karena fokus pemerintah Jepang tertuju pada Perang Asia Timur Raya. Perguruan tinggi juga mengalami kesulitan akibat pelarangan buku berbahasa Belanda dan Inggris, meskipun larangan ini dicabut saat Geneeskundige Hoge School menjadi Ika Daigaku. Ika Daigaku, meskipun menjadi pusat perlawanan terhadap Jepang, tidak banyak mengubah kondisi perpustakaan sekolah secara umum (Basuki, S)²⁸³.

Situasi perpustakaan sekolah mulai membaik setelah kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan data sensus tahun 2018, terdapat 113. 541 perpustakaan sekolah/madrasah di Indonesia. Angka ini meningkat pesat menjadi 140. 643 pada Juni 2023, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan literasi di tingkat sekolah. (Nasional, 2020)²⁸⁴

²⁸¹ Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., & Caspari, A. K. (2015). *Guided inquiry: Learning in the 21st century*. Bloomsbury Publishing USA.

²⁸² Basuki, S. (1994). *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Remaja Rosdakarya.

²⁸³ <https://sulistyobasuki.wordpress.com>

²⁸⁴ Nasional, P. (2020). Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024. *no. Agustus, 2020*.

Peningkatan jumlah perpustakaan sekolah ini tentu membawa dampak positif bagi pendidikan dan perkembangan siswa. Akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, jurnal, dan materi pembelajaran lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa di seluruh Indonesia.

Namun, tantangan tetap ada. Peningkatan kuantitas harus diimbangi dengan peningkatan kualitas. Koleksi yang relevan, staf terlatih, fasilitas memadai, dan program literasi yang aktif merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah akan memastikan bahwa perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang aktif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik.

6.4 Misi dan Standar Perpustakaan Sekolah/Madrasah

IFLA School Library Manifesto (2021) menjabarkan misi perpustakaan sekolah sebagai berikut:

Program perpustakaan sekolah dan pustakawan sekolah yang berkualitas berfokus pada pertumbuhan siswa dengan menyediakan akses yang adil untuk pengalaman belajar, sumber daya, dan ruang belajar yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk menjadi pemikir kritis yang terlibat, pembaca yang efektif, dan pengguna, evaluator, dan pencipta informasi yang bertanggung jawab dalam berbagai format.²⁸⁵

Misi perpustakaan sekolah/madrasah tidak dirumuskan secara eksplisit dalam UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. Namun, analisis beberapa pasal dalam kedua peraturan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai misi perpustakaan sekolah.

Pertama, Pasal 1 ayat (11) UU No. 43 Tahun 2007 menegaskan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah adalah bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah memiliki misi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui penyediaan sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Kedua, Pasal 23 ayat (1) dalam UU tersebut mewajibkan perpustakaan sekolah/madrasah untuk memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, perpustakaan sekolah/madrasah memiliki misi untuk menyediakan layanan dan koleksi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menjamin kualitas dan efektivitas layanan kepada pengguna.

Selanjutnya, Pasal 48 ayat (1) dan (3) UU No 43 Tahun 2007 menekankan peran perpustakaan sekolah/madrasah dalam pembudayaan kegemaran membaca sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah

²⁸⁵ Oberg, D. (2021). IFLA School Library Manifesto 2021: Inspiration and Aspiration. *Canadian School Libraries Journal*, 5(3).

/madrasah memiliki misi untuk mendorong minat baca siswa dan guru melalui berbagai kegiatan dan program literasi.

Selain itu, Pasal 11 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2014 mengatur bahwa koleksi perpustakaan sekolah harus meliputi buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, dan terbitan berkala. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah memiliki misi untuk menyediakan koleksi yang beragam dan relevan dengan kebutuhan belajar siswa dan guru.

Terakhir, Pasal 83 PP tersebut mewajibkan perpustakaan sekolah/madrasah untuk mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, perpustakaan sekolah/madrasah memiliki misi untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas sumber belajar melalui pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan terkait, dapat disimpulkan bahwa misi perpustakaan sekolah /madrasah adalah:

1. Mendukung kegiatan pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang diperlukan siswa dan guru.
2. Menjadi pusat sumber belajar dengan menyediakan berbagai jenis koleksi untuk mendukung kebutuhan belajar siswa dan guru.
3. Membudayakan kegemaran membaca melalui berbagai kegiatan dan program literasi.
4. Mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas sumber belajar.

American Association of School Librarians (AASL) menyatakan bahwa misi perpustakaan sekolah adalah "untuk memastikan bahwa siswa dan staf adalah pengguna ide dan informasi yang efektif" (AASL 2009)²⁸⁶. Asosiasi tersebut mengidentifikasi lima cara agar perpustakaan sekolah mencapai misi mereka:

- (1) berkolaborasi dengan pendidik dan siswa untuk merancang dan mengajarkan pengalaman belajar yang menarik yang memenuhi kebutuhan individu;
- (2) menginstruksikan siswa dan membantu pendidik dalam menggunakan, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi dan ide melalui penggunaan aktif berbagai alat, sumber daya, dan teknologi informasi yang tepat;
- (3) menyediakan akses ke materi dalam semua format, termasuk literatur terkini, berkualitas tinggi, bervariasi untuk mengembangkan dan memperkuat kecintaan membaca;
- (4) menyediakan siswa dan staf dengan instruksi dan sumber daya yang mencerminkan kebutuhan informasi saat ini dan mengantisipasi perubahan dalam teknologi dan pendidikan;
- (5) memberikan kepemimpinan dalam program pendidikan total dan mengadvokasi program media perpustakaan sekolah yang

²⁸⁶AASL (American Association of School Librarians (2009). *Empowering Learners: Guidelines for School Library Programs*. Chicago: American Library Association.

kuat sebagai hal yang penting untuk memenuhi tujuan pendidikan lokal, negara bagian, dan nasional. (AASL 2009, 8)²⁸⁷

Meskipun deskripsi ini memberikan gambaran umum mengenai kegiatan perpustakaan sekolah, asosiasi tersebut menjelaskan pekerjaan secara lebih mendalam dengan menciptakan standar baru— Standar Perpustakaan Sekolah Nasional untuk Pembelajar, Pustakawan Sekolah, dan Perpustakaan Sekolah (AASL 2018)²⁸⁸. Standar-standar ini mencerminkan pemikiran paling kontemporer tentang tujuan perpustakaan sekolah dan bagaimana mencapainya. Standar menangani tiga bidang yang berbeda: peserta didik (siswa, pendidik), pustakawan sekolah, dan perpustakaan sekolah. Sesuai dengan tema-tema baru yang mempengaruhi pendidikan, fokusnya adalah pada siswa daripada koleksi perpustakaan dan bagaimana perpustakaan sekolah dapat melayani siswa dengan baik. Dalam mengembangkan standar barunya, asosiasi mengidentifikasi enam keyakinan inti yang penting bagi perpustakaan sekolah dan kepustakawanan:

1. Perpustakaan sekolah adalah bagian yang unik dan penting dari komunitas belajar: Perpustakaan adalah “tempat ketiga” antara ruang kelas dan rumah, memberikan kesempatan belajar yang dipersonalisasi untuk semua pelajar.
2. Pustakawan sekolah yang berkualifikasi memimpin perpustakaan sekolah yang efektif: Pustakawan sekolah profesional berfungsi sebagai pendidik, spesialis informasi, administrator, dan mitra yang menyusun sumber daya dan staf untuk memberikan pengalaman belajar terbaik.
3. Pelajar harus dipersiapkan untuk kuliah, karir, dan kehidupan: Perpustakaan dan pustakawan sekolah berdedikasi untuk menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, adil, dan dipersonalisasi yang mempersiapkan pelajar untuk sukses dalam hidup.
4. Membaca adalah inti dari kompetensi pribadi dan akademik: Perpustakaan sekolah memotivasi pelajar dan keluarga mereka untuk membaca apa pun formatnya dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat.
5. Kebebasan intelektual adalah hak setiap pelajar: Perpustakaan mendorong paparan berbagai macam ide dan mempromosikan kebebasan berbicara, menghormati pendapat yang beragam, dan berpikir kritis.
6. Teknologi informasi harus terintegrasi dengan tepat dan tersedia secara merata: Perpustakaan sekolah membantu menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi

²⁸⁷ AASL (American Association of School Librarians). (2009). *Ibid.*

²⁸⁸ AASL (American Association of School Librarians 2018. National School Library Standards for Learners, School Librarians, and School Libraries. Chicago: American Library Association.

dengan menyediakan akses yang adil ke teknologi dan dengan membantu pelajar mengembangkan kecakapan dalam penggunaannya. (AASL 2018; Mardis 2017a)²⁸⁹

Pustakawan sekolah berfungsi sebagai pemandu yang sangat terampil melalui sumber cetak dan digital, mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menantang, dan mempromosikan pemikiran kritis dan kreatif. Pustakawan membahas literasi dalam segala bentuknya—cetak, audio, visual, dan digital. AASL mengembangkan kerangka kerja berlapis-lapis untuk memahami dan menerapkan standar barunya yang terlalu rumit untuk dijelaskan di sini. Namun, di pusat kerangka kerja adalah Yayasan Bersama, yang terdiri dari enam konsep—Tanyakan, Sertakan, Kolaborasi, Kurasi, Jelajahi, dan Terlibat:

1. *Inquire*: Membangun pengetahuan baru dengan bertanya, berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah.
2. *Tebuka*: Menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap inklusivitas dan menghormati keragaman dalam komunitas belajar.
3. *Berkolaborasi*: Bekerja secara efektif dengan orang lain untuk memperluas perspektif dan bekerja menuju tujuan bersama.
4. *Curate*: Membuat makna bagi diri sendiri dan orang lain dengan mengumpulkan, mengatur, dan berbagi sumber daya relevansi pribadi.
5. *Jelajahi*: Temukan dan berinovasi dalam mindset berkembang yang dikembangkan melalui pengalaman dan refleksi.
6. *Terlibat*: Tunjukkan penciptaan dan berbagi produk pengetahuan yang aman, legal, dan etis secara mandiri sambil terlibat dalam komunitas praktik dan dunia yang saling terhubung. (AASL 2018, 59–64)²⁹⁰

Setiap konsep dikaitkan dengan kompetensi yang berkembang melalui empat Ranah pembelajaran yang diidentifikasi sebagai Berpikir, Menciptakan, Berbagi, dan Bertumbuh (Mardis 2017b):

1. *Berpikir*: Menanyakan, berpikir kritis, dan memperoleh pengetahuan. Ini adalah domain kognitif.
2. *Buat*: Menarik kesimpulan, membuat keputusan berdasarkan informasi, menerapkan pengetahuan pada situasi baru, dan menciptakan pengetahuan baru. Ini adalah domain psikomotor.
3. *Berbagi*: Berbagi pengetahuan dan berpartisipasi secara etis dan produktif sebagai anggota masyarakat demokratis kita. Ini adalah domain afektif.
4. *Tumbuh*: Mengejar pertumbuhan pribadi dan estetika. Ini adalah domain perkembangan.²⁹¹

²⁸⁹ *Ibid*

²⁹⁰ *Ibid*

²⁹¹ Mardis, M. A. (2017b). Shared Foundations, Shared Implementation. *Knowledge Quest*, 46, 84.

Ada banyak hubungan timbal balik antara Domain dan Yayasan Bersama, tetapi tidak sulit untuk melihat nilai-nilai apa yang mendasari standar ini: pemikiran kritis, kreativitas, keterbukaan terhadap orang lain dan ide-ide baru, kemauan untuk bekerja secara produktif dengan orang lain, dan keinginan untuk berkembang sebagai pribadi. Cromartie and Burns (2019) mengamati bahwa standar baru tentang pustakawan sekolah untuk menerima perubahan dan membayangkan perpustakaan sebagai lingkungan yang berkembang, berkembang dalam lanskap pendidikan dan informasi yang selalu berubah. (h,79)²⁹²

Seperti halnya perpustakaan umum, perpustakaan sekolah telah berevolusi dari terutama menyediakan buku di rak menjadi menyediakan banyak bahan dalam format baru dan telah mengalihkan penekanan dari akses fisik ke akses di internet (AASL 2014a)²⁹³. Ruang perpustakaan juga berubah. Meskipun perpustakaan sekolah mungkin masih memiliki rak dan meja, mereka juga merupakan tempat untuk tampil dan berpartisipasi dalam kegiatan, untuk membuat proyek kelas, untuk memfasilitasi komunikasi dan ekspresi diri, untuk blogging dan penggunaan media sosial lainnya (AASL 2014b)²⁹⁴. Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai tempat di mana siswa belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik dan menerima orang lain.

Cromartie and Burns (2019) mencatat bahwa peran pustakawan sekolah telah bergeser dari yang berfokus pada materi menjadi fokus pada siswa; dari mencari informasi spesifik hingga menyediakan mediasi yang mendorong keterampilan berpikir kritis; dari pemilik pengetahuan menjadi pencipta pengetahuan; dari bekerja dalam isolasi menjadi penghubung bagi orang lain; dari menjadi penegak aturan menjadi pemicu pembelajaran; dari protektif dan pasif menjadi proaktif dan inklusif; dan dari menjadi pencari fakta menjadi panduan untuk evaluasi dan penggunaan sumber daya²⁹⁵. Seperti yang diamati Searles (2019), “Standar AASL mewakili kesempatan bagi semua pustakawan sekolah di seluruh negeri untuk mundur, merenungkan praktik mereka, dan mencari cara untuk tumbuh dalam pelayanan kepada pelajar dan komunitas sekolah mereka”(52).

6.5 Nilai Keberadaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Nilai keberadaan perpustakaan sekolah adalah sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Kehadiran perpustakaan sekolah yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap

²⁹² Cromartie, K., & Burns, E. (2019). Navigating the Library Slopes: Dispositional Shifts in the National School Library Standards. *Knowledge Quest*, 47, 78-83.

²⁹³ American Association of School Librarians. (2014a). *Learning Standards and Common Core State Standards Crosswalk*.

²⁹⁴ American Association of School Librarians. (2014b). *Developing Collections to Empower Learners*. Chicago: American Library Association.

²⁹⁵ Cromartie, K., & Burns, E. (2019). Navigating the Library Slopes: Dispositional Shifts in the National School Library Standards. *Knowledge Quest*, 47, 78-83.

prestasi akademik siswa, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan mereka. Jadi bagaimana perpustakaan sekolah/madrasah sekolah membuktikan nilainya?

Pustakawan sekolah/madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam komunitas sekolah. Wilkey (2019) mengemukakan sepuluh alasan yang menggarisbawahi kontribusi signifikan mereka²⁹⁶. Mereka tidak hanya menguasai teknologi informasi, tetapi juga membimbing siswa dalam menilai kredibilitas sumber informasi. Selain itu, pustakawan sekolah/madrasah berperan sebagai pengajar yang memberikan pemahaman tentang hak cipta, penggunaan wajar, teknik penelitian yang baik, dan berita palsu kepada siswa dan guru.

Lebih dari sekadar penjaga buku, pustakawan sekolah/madrasah adalah fasilitator pembelajaran yang membantu siswa menciptakan pengetahuan dan belajar dari berbagai teks. Mereka mendorong eksperimen dan kreativitas tanpa batasan kelas, serta membimbing siswa dalam menjelajahi sejarah dan memahami pentingnya masa lalu.

Pustakawan sekolah/madrasah juga menghargai keunikan setiap individu dalam hal kepribadian dan gaya belajar, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Mereka membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial, seperti literasi digital dan berpikir kritis. Selain itu, mereka juga berperan dalam menumbuhkan sikap kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan menghargai nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, pustakawan sekolah/madrasah bukan hanya pengelola perpustakaan, tetapi juga pendidik, pembimbing, dan agen perubahan yang berperan penting dalam membentuk generasi muda yang berpengetahuan, kritis, dan berwawasan luas.

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah dan pustakawan profesional memiliki dampak positif yang signifikan terhadap prestasi akademik siswa, bahkan ketika faktor-faktor seperti kemakmuran sekolah, demografi, pendanaan, rasio guru-murid, dan kualifikasi guru telah diperhitungkan.

Lance dan Kachel (2018) menemukan hubungan yang kuat antara kehadiran pustakawan sekolah penuh waktu dan skor tes yang lebih tinggi dalam bidang seni bahasa, membaca, dan menulis.²⁹⁷ Penelitian sebelumnya oleh Lance, Welborn, dan Hamilton-Pennell (1993) juga menunjukkan bahwa siswa di sekolah dengan koleksi perpustakaan yang lebih besar dan pustakawan terlatih cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada tes referensi norma. Selain itu, kinerja akademik yang tinggi

²⁹⁶Wilkey, E. (2019). 10 Reasons School Librarians Are More Important Than Ever. *eSchool News*.

²⁹⁷ Lance, K. C., & Kachel, D. E. (2013). Achieving Academic Standards through the School Library Program. *Teacher Librarian*, 40, 8-13.

berkorelasi dengan kehadiran pustakawan sekolah profesional yang berperan dalam instruksi dan kolaborasi.²⁹⁸

Penelitian lebih lanjut di Ohio oleh Todd (2003) mengkonfirmasi bahwa perpustakaan sekolah yang efektif, dipimpin oleh pustakawan sekolah yang terintegrasi dalam pedagogi yang berpusat pada informasi, berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran siswa.²⁹⁹ Studi di Colorado (Lance dan Hofschire, 2012)³⁰⁰ dan Kansas (Scholastic, 2016) juga menemukan hubungan positif antara kehadiran pustakawan sekolah dan skor kecakapan yang lebih tinggi di berbagai mata pelajaran³⁰¹.

Studi di Pennsylvania dan South Carolina (Scholastic, 2016) mengungkapkan bahwa perpustakaan sekolah yang memiliki staf yang baik dan sumber daya yang memadai berkorelasi dengan tingkat keberhasilan akademik yang lebih tinggi, terutama dalam membaca dan menulis. Selain itu, studi di Washington State (Scholastic, 2016) menunjukkan bahwa pustakawan bersertifikat berkontribusi pada akses yang lebih adil ke fasilitas perpustakaan berteknologi maju dan keterampilan teknologi informasi yang lebih baik bagi siswa.

Temuan-temuan ini memberikan bukti yang meyakinkan bahwa pustakawan sekolah dan perpustakaan sekolah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap hasil pendidikan siswa. Pustakawan sekolah harus secara aktif mengkomunikasikan informasi ini kepada pemangku kepentingan pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan bagi perpustakaan sekolah.

6.6 Kerjasama Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perpustakaan Umum

Kemitraan antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum merupakan strategi kunci dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya dan layanan pendidikan. Perpustakaan sekolah, dengan koleksi yang seringkali terbatas, dapat memanfaatkan kekayaan koleksi dan sumber daya perpustakaan umum melalui program kerjasama yang terstruktur.

Program kerjasama ini dapat mencakup berbagai bentuk kegiatan, mulai dari kunjungan kelas oleh pustakawan umum, perpanjangan periode peminjaman untuk guru, hingga penyediaan informasi tentang sumber daya online, koordinasi bahan

²⁹⁸ Lance, K. C., Welborn, L., & Hamilton-Pennell, C. (1993). *The Impact of School Library Media Centers on Academic Achievement*. Castle Rock, CO: Hi Willo Research and Publishing.

²⁹⁹ Todd, R. J. (2003). *Student learning through Ohio school libraries: A summary of the Ohio research study*: Ohio Educational Library Media Association.

³⁰⁰ Lance, K. C., & Hofschire, L. (2012). *Change in School Librarian Staffing Linked with Change in CSAP Reading Performance, 2005 to 2011*. Denver: Library Research Service.

³⁰¹ Scholastic. 2016. *School Libraries Work! A Compendium of Research Supporting the Effectiveness of School Libraries*.

perpustakaan dengan kurikulum sekolah, serta pelatihan literasi informasi bagi siswa. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga mendukung pengembangan profesional guru.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (SNP Sekolah/Madrasah) secara implisit mendorong kerjasama ini. Pasal 4 ayat (2) tentang inovasi dan kreativitas perpustakaan, Pasal 8 ayat (6) tentang kerja sama perpustakaan, dan Pasal 11 tentang indeks pembangunan literasi masyarakat, semuanya membuka peluang bagi perpustakaan sekolah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perpustakaan umum.

Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tidak secara eksplisit membahas kerjasama antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum.

Namun, terdapat beberapa poin dalam Renstra ini yang secara tidak langsung dapat mendorong dan mendukung kerjasama tersebut:

1. Peningkatan Budaya Literasi melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Renstra Perpustakaan Nasional menekankan pentingnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan budaya literasi. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Konsep ini sejalan dengan semangat kerjasama antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum, di mana kedua jenis perpustakaan ini dapat bekerja sama untuk menyediakan layanan yang lebih inklusif dan menjangkau masyarakat yang lebih luas.
2. Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Melalui Akreditasi dan Standarisasi: Renstra Perpustakaan Nasional juga mendorong pengembangan dan pembinaan perpustakaan melalui akreditasi dan standarisasi. Dalam proses akreditasi dan standarisasi, perpustakaan sekolah dapat menjalin kerjasama dengan perpustakaan umum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
3. Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan yang Terpadu dan Inovasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi: Renstra Perpustakaan Nasional juga menekankan pentingnya penguatan sistem informasi perpustakaan yang terpadu dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat menjadi peluang bagi perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan menyediakan layanan digital yang inovatif bagi pengguna.

Potensi kerjasama ini didukung oleh tingginya dukungan publik. Survei menunjukkan bahwa 85% populasi Amerika Serikat percaya bahwa perpustakaan

umum harus berkoordinasi lebih erat dengan sekolah lokal (Swan et al. , 2014)³⁰². Angka ini menunjukkan adanya kebutuhan dan harapan masyarakat akan sinergi antara kedua jenis perpustakaan ini.

Sejumlah hasil kemitraan yang produktif termasuk katalog bersama, proyek penyiangan bersama, dan katalogisasi barang-barang sekolah sehingga dapat diakses oleh perpustakaan umum. Katalog online memungkinkan siswa untuk mengakses koleksi sekolah negeri, swasta, piagam, dan paroki, serta museum. Perjanjian pembelian bersama memungkinkan sekolah untuk meningkatkan daya beli perpustakaan umum yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, perpustakaan umum mengizinkan ID siswa berfungsi sebagai kartu perpustakaan untuk perpustakaan umum (Peet,2018).³⁰³

Meskipun kemitraan antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum memiliki manfaat yang jelas, beberapa faktor dapat menghambat kolaborasi ini:

1. Struktur Politik yang Terpisah: Sekolah dan perpustakaan umum seringkali beroperasi di bawah divisi politik yang berbeda, sehingga kurangnya dukungan administratif atau dewan untuk kerjasama menjadi kendala utama.
2. Keterbatasan Waktu dan Fokus: Guru, pustakawan sekolah, dan pustakawan umum memiliki tanggung jawab yang padat dalam institusi masing-masing, sehingga sulit meluangkan waktu dan perhatian untuk kerjasama.
3. Keterbatasan Sumber Daya Fiskal: Anggaran yang terbatas dapat membatasi waktu dan staf yang tersedia untuk mengembangkan dan melaksanakan program kerjasama.
4. Kekhawatiran tentang Subsidi Tidak Tepat: Pustakawan umum seringkali khawatir bahwa kerjasama akan mengalihkan sumber daya perpustakaan umum untuk menutupi kekurangan anggaran sekolah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah itu sendiri.
5. Kurangnya Keahlian: Keberhasilan kerjasama membutuhkan keahlian khusus dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Kurangnya keahlian ini dapat menghambat pengembangan kerjasama yang efektif.

Faktor-faktor ini menunjukkan kompleksitas dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Namun, dengan mengatasi kendala-kendala ini melalui komunikasi yang efektif, dukungan kepemimpinan, dan pengembangan kapasitas, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa, guru, dan komunitas secara keseluruhan.

Contoh terbaik dari kolaborasi antara perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum adalah fasilitas gabungan sekolah-perpustakaan umum. Konsep

³⁰² Swan, D. W., Grimes, J., Owens, T., Miller, K., Arroyo, J., Craig, T., Dorinski, S., Freeman, M., Isaac, N., O'Shea, P., Padgett, R., Schilling, P., & Scotto, J. (2014). *Public Libraries in the United States Survey: Fiscal Year 2011 (IMLS-2014-PLS-01)*. Washington, DC: Institute of Museum and Library Services.

³⁰³Peet, L. (2018). Grade A partnerships. *Library Journal*, 143(14), 19-23.

ini menarik, terutama di masa ekonomi sulit, karena memungkinkan lembaga publik untuk memaksimalkan efisiensi fiskal. Siswa dapat memperoleh manfaat dari pustakawan terlatih dan koleksi yang lebih besar daripada perpustakaan sekolah biasa.

Namun, Blount (2002) menyoroti beberapa tantangan dalam mengelola fasilitas gabungan, seperti menentukan otoritas pengelolaan, penggunaan fasilitas, kebijakan akses materi, alokasi biaya, tanggung jawab katalogisasi dan pemrosesan, prioritas penggunaan, manajemen staf, dan penanganan konflik potensial antara staf perpustakaan sekolah dan umum. (Blount 2002)³⁰⁴

Terlepas dari tantangan tersebut, fasilitas gabungan menawarkan sejumlah manfaat, termasuk sumber daya bersama, jam operasional yang lebih luas, peningkatan efisiensi ekonomi, teknologi bersama, keahlian bersama, dan dukungan komunitas. Meskipun fasilitas gabungan masih jarang, kolaborasi dan kemitraan lain antara perpustakaan sekolah dan umum semakin meningkat.

Peet (2017) mengamati bahwa perpustakaan umum saat ini meningkatkan upaya kolaborasi strategis dalam skala besar, mengintegrasikan layanan perpustakaan umum ke dalam operasi sekolah sehari-hari, dan menggabungkan katalog serta layanan akses. Kolaborasi ini mencerminkan tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola dana secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat.³⁰⁵

6.7 Perpustakaan Sekolah/Madrasah Sebagai Katalis Transformasi Pendidikan Abad Ke-21

Dalam lanskap pendidikan yang terus berkembang, perpustakaan sekolah/Madrasah bukan lagi sekadar gudang buku, melainkan agen perubahan yang responsif terhadap kebutuhan siswa abad ke-21. Laporan Horizon NMC/CoSN (Freeman dkk., 2017) mengidentifikasi sepuluh tren utama yang membentuk ulang pendidikan, antara lain:

1. Transformasi budaya menuju pembelajaran progresif.
2. Siswa sebagai pencipta aktif.
3. Pembelajaran lintas disiplin.
4. Tantangan kesetaraan dalam penggunaan teknologi.
5. Pengukuran pembelajaran berkelanjutan.
6. Kefasihan digital yang mendalam.
7. Pembelajaran autentik sebagai kebutuhan.
8. Peran guru yang terus berkembang.
9. Pemikiran komputasi dalam kurikulum.
10. Redesign ruang belajar yang fleksibel.³⁰⁶

³⁰⁴ Blount, P., & Gardow, P. (2002). Double your fun with a combination public-high school library. *Public Libraries*, 41(5), 254-55.

³⁰⁵ Peet, Lisa. 2017. "Public Partners." *Library Journal* 143 (April 15): 36–39.

³⁰⁶ Freeman, A., Becker, S. A., & Cummins, M. (2017). *NMC/CoSN horizon report: 2017 K*. The New Media Consortium.

Berangkat dari tren ini, pendidikan abad ke-21 berpusat pada siswa, dengan teknologi sebagai alat bantu utama. Pembelajaran menjadi personal, adaptif terhadap kebutuhan individu, dan responsif terhadap keragaman budaya. Peran guru pun bergeser menjadi fasilitator dan mentor yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

Dalam konteks ini, Perpustakaan sekolah/madrasah memiliki peran krusial dalam memimpin dan mendukung transformasi pendidikan yang meliputi berbagai aspek penting yaitu:

1. Pusat Akses Teknologi dan Pembelajaran Digital: Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses ke komputer, internet, dan perangkat lunak pendidikan, tetapi juga menjadi pusat pelatihan literasi digital bagi siswa dan guru. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi abad ke-21, termasuk literasi digital.
2. Fasilitator Pembelajaran yang Dipersonalisasi: Perpustakaan menyediakan beragam sumber daya, baik cetak maupun digital, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar setiap siswa. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran diferensiasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.³⁰⁷
3. Ruang Belajar Kolaboratif dan Kreatif: Perpustakaan didesain ulang menjadi ruang yang fleksibel, mendorong interaksi, kolaborasi, dan kreativitas siswa. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran aktif yang ditekankan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.
4. Pendukung Guru sebagai Fasilitator: Perpustakaan menyediakan sumber daya dan pelatihan profesional bagi guru, membantu mereka beradaptasi dengan peran baru sebagai fasilitator dan mentor. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menekankan pentingnya pengembangan profesional guru.³⁰⁸
5. Penghubung Antar Disiplin Ilmu: Perpustakaan menyediakan koleksi yang kaya dan beragam, mendukung pembelajaran lintas disiplin yang semakin relevan di dunia kerja saat ini.
6. Penjaga Keadilan Akses Informasi: Perpustakaan memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap informasi dan teknologi, sesuai dengan prinsip keadilan pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁰⁹

³⁰⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

³⁰⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

³⁰⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan menjalankan peran-peran ini, perpustakaan sekolah tidak hanya menjadi katalis transformasi pendidikan, tetapi juga agen pemberdayaan siswa dan guru dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

6.8 Makerspaces di Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Makerspace, ruang kreatif yang mendorong pembelajaran langsung dan kolaboratif, semakin populer di perpustakaan sekolah/Madrasah. Jacobson (2017) melaporkan bahwa mayoritas sekolah dasar dan menengah memiliki ruang pembuat di perpustakaan mereka. Ruang ini tidak hanya memfasilitasi eksplorasi dan pemecahan masalah, tetapi juga menumbuhkan budaya "pembuat" yang menghargai kreativitas dan inovasi.³¹⁰

Makerspace menyediakan berbagai sumber daya, mulai dari teknologi canggih seperti printer 3D dan kamera video hingga bahan-bahan sederhana untuk seni dan kerajinan. Meskipun teknologi canggih menjadi daya tarik utama, makerspace juga menjadi tempat penting untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah dan kolaborasi, serta mendorong pembelajaran peer-to-peer.

Pustakawan sekolah memainkan peran penting dalam mengelola dan mengintegrasikan makerspace ke dalam kurikulum. G. Lynch (2018) mencatat bahwa di sebagian besar sekolah dengan makerspace, pustakawan sekolah terlibat aktif dalam mengoordinasikan kegiatan pembuat dengan guru. Survei oleh *School Library Journal* juga mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga pustakawan menghubungkan kegiatan makerspace dengan kurikulum umum.³¹¹

Makerspace memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Hinton (2018) berpendapat bahwa makerspace membantu siswa menemukan minat baru, mengembangkan keterampilan baru, dan bahkan mengidentifikasi jalur karier yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pendekatan langsung dan berbasis proyek dari makerspace mendorong keterampilan pemecahan masalah yang berharga di sekolah dan kehidupan sehari-hari.³¹²

McQuinn (2018) menambahkan bahwa makerspace memiliki dukungan ilmu saraf yang kuat karena melibatkan penggunaan tangan, latihan dan pengulangan, permainan dan eksperimen yang tidak terstruktur, respons emosional positif, dan pembelajaran dalam lingkungan yang minim stres. Semua faktor ini berkontribusi pada lingkungan belajar yang optimal.

Makerspace tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga dapat menarik siswa yang biasanya tidak aktif di perpustakaan dan memberikan kesempatan bagi siswa yang mungkin kesulitan di kelas tradisional untuk berhasil dalam lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, makerspace merupakan investasi berharga bagi sekolah dan perpustakaan dalam mendukung perkembangan holistik siswa.

³¹⁰ Jacobson, L. (2017). Making moves ahead. *School Library Journal*, 63(9), 38-44.

³¹¹ Lynch, G. H. (2018). Maker Grows Up. *School Library Journal*, 64, 36-40.

³¹² Hinton, Marva. "Making the Difference." *School Library Journal* 64 (2018): 25-27.

Pustakawan sekolah memainkan peran aktif dalam mengelola dan mengintegrasikan makerspace ke dalam lingkungan pendidikan. G. Lynch (2018) melaporkan bahwa 90% sekolah dengan makerspace melibatkan pustakawan sekolah, dan tiga perempat dari mereka berkolaborasi dengan guru dalam merancang kegiatan yang relevan dengan kurikulum. Jacobson (2017) menambahkan bahwa sekitar sepertiga pustakawan sekolah mengindikasikan bahwa kegiatan makerspace mereka terhubung langsung dengan kurikulum umum, dengan persentase yang lebih tinggi di sekolah dasar dibandingkan sekolah menengah.

Makerspace tidak hanya digunakan untuk kegiatan kurikulum, tetapi juga menawarkan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka di luar jam pelajaran. Hinton (2018) menekankan potensi makerspace dalam membantu siswa menemukan minat baru, mengembangkan keterampilan, dan bahkan mengidentifikasi jalur karier potensial. Makerspace juga dapat menjadi daya tarik bagi siswa yang biasanya tidak aktif di perpustakaan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin kesulitan di kelas tradisional untuk berkembang dalam lingkungan belajar yang berbeda.³¹³

McQuinn (2018) menyoroti bahwa makerspace memiliki dasar yang kuat dalam ilmu saraf, karena melibatkan aktivitas yang kondusif untuk belajar, seperti penggunaan tangan, latihan dan pengulangan, permainan dan eksperimen yang tidak terstruktur, respons emosional positif, dan pembelajaran dalam lingkungan yang minim stres.³¹⁴ Karena manfaatnya yang jelas, banyak sekolah mendukung makerspace dengan pendanaan khusus, dan beberapa sekolah bahkan menggunakan crowdfunding untuk melengkapi peralatan mereka (G. Lynch, 2018).³¹⁵

6.9 Transformasi Perpustakaan Sekolah: Menjembatani Tradisi dan Teknologi Untuk Pembelajaran Abad 21

Perpustakaan sekolah menghadapi masalah yang sama dengan perpustakaan umum dalam upaya mempertahankan layanan tradisional sambil menganggarkan teknologi baru dan akses ke konten digital. Meskipun siswa yang lahir setelah tahun 1990 (Generasi Z) cenderung melek teknologi karena mereka tumbuh dengan akses nirkabel, video game, dan perangkat nirkabel multitasking, kemahiran ini tidak berarti bahwa mereka tahu cara mengakses informasi secara efisien atau mengevaluasinya secara kritis. Faktanya, ada kebutuhan yang jelas untuk mengajarkan siswa bagaimana menemukan dan mengevaluasi informasi yang valid. Standar AASL baru secara khusus mengintegrasikan literasi komputer dalam kerangka kerja dan keyakinan inti yang lebih luas, dan teknologi disertakan secara eksplisit dalam berbagai standar itu sendiri. Sebagai catatan Standar:

³¹³ Hinton, Marva. 2018. "Making the Difference." *School Library Journal* 64:25–27.

³¹⁴ McQuinn, Conn. 2018. "The Neuroscience of Making." *School Library Journal* 64:10–11.

³¹⁵ Lynch, Grace Hwang. 2018. "Maker Grows Up." *School Library Journal* 64:36–40

Pembelajar memerlukan akses ke teknologi dan sumber daya online. Perpustakaan sekolah yang efektif memiliki teknologi pengajaran dan pembelajaran yang memadai dan mutakhir. Sebagai bagian dari perpustakaan sekolah, pustakawan sekolah memberikan kepemimpinan dan instruksi kepada pendidik dan peserta didik tentang cara menggunakan teknologi informasi ini secara konstruktif, etis, dan aman. (AASL 2018,hal 56)³¹⁶

Peran pustakawan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam lingkungan belajar baru-baru ini disorot oleh pertumbuhan gerakan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) dan Future Ready Librarians (FRL) di Amerika Serikat.

ATPUSI adalah organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah berkedudukan didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2009. ATPUSI merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri. Gerakan ini tumbuh dari inisiatif Pengelola perpustakaan sekolah yang ada di Indonesia.

Berdirinya organisasi ini diawali dari sebuah konvensi dan seminar nasional tenaga perpustakaan sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 27 sd 29 Mei 2009 di Hotel Millenium Jakarta, Perpustakaan Sekolah Santa Ursula, dan Perpustakaan Nasional. Kegiatan hebat ini difasilitasi oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI. Kegiatan ini diikuti oleh 137 perwakilan tenaga perpustakaan sekolah dari masing-masing propinsi, Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI), serta peserta tamu dari International Federation of Library Association (IFLA) dan International Association of School Librarianship (IASL).

Kegiatan yang bertajuk “Konvensi Dan Seminar Nasional Tenaga Perpustakaan Sekolah Tahun 2009”berlangsung selama 3 hari dengan tujuan : (1) untuk meningkatkan pengetahuan tentang standar kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah yang tertuang dalam Permendiknas No. 25 tahun 2009; (2) sebagai forum diseminasi informasi tentang Undang-Undang Perpustakaan, arah pengembangan perpustakaan nasional; (3) benchmarking kualifikasi, kompetensi, sistem pembinaan dan pemberdayaan tenaga perpustakaan sekolah di negara lain, seperti Hongkong, Malaysia, dan Singapura; dan (4) deklarasi lahirnya Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), lebih lanjut informasi tentang ATPUSI dapat dilihat dari web(<http://atpusi.or.id>) Pembahasa tentang aktifitas ATPUSI akan dibahas pada bagian khusus pada kesempatan lain

Di Amerika Serikat Peran pustakawan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam lingkungan belajar baru-baru ini disorot oleh pertumbuhan gerakan Future Ready Librarians (FRL). Gerakan ini tumbuh dari inisiatif Future Ready Schools (FRS) yang dibuat pada tahun 2014 oleh Alliance for Excellent

³¹⁶ AASL (American Association of School Librarians). National School Library Standards for Learners, School Librarians, and School Libraries. Chicago: American Library Association, 2018.

Education (All4Ed) dan diluncurkan sebagai bagian dari inisiatif Gedung Putih Presiden Obama untuk meningkatkan konektivitas digital dalam pendidikan (Ray dan Trettin 2016). Jaringan FRS mencakup lebih dari 3.400 distrik sekolah dan lebih dari lima puluh organisasi mitra termasuk Departemen Pendidikan AS. Kabupaten yang berpartisipasi berkomitmen pada keyakinan bahwa setiap anak, terlepas dari pendapatan atau lokasi, berhak mendapatkan akses ke hal-hal berikut:

- (1) Lingkungan belajar yang berpusat pada siswa yang dipersonalisasi;
- (2) Pembelajaran yang menyentuh hasrat dan minat untuk keterlibatan dan agensi yang lebih dalam;
- (3) Pengalaman belajar yang kuat yang mempersiapkan siswa untuk angkatan kerja dan dunia yang semakin didorong oleh teknologi;
- (4) Strategi pembelajaran digital berbasis penelitian dilaksanakan dengan kepedulian dan guru yang berkualitas;
- dan (5) Jalur yang jelas menuju kesuksesan pasca sekolah menengah yang melaluinya setiap anak mencapai potensinya. (FRS 2019a, 1-2)³¹⁷

Praktik pembelajaran yang direkomendasikan oleh All4Ed berbasis penelitian, berfokus pada siswa, dan berorientasi pada teknologi serta membutuhkan kepemimpinan kolaboratif dan budaya inovatif. Penggunaan teknologi digital yang efektif merupakan inti dari strategi implementasi, yang, pada gilirannya, didasarkan pada kerangka kerja yang menyediakan “struktur untuk visi, perencanaan, dan implementasi pembelajaran digital” (FRS 2019b, 1). Kerangka tersebut menekankan kepemimpinan kolaboratif; pembelajaran profesional yang dipersonalisasi; infrastruktur yang kuat; kurikulum, pengajaran, dan penilaian; anggaran dan sumber daya; kemitraan masyarakat; data dan privasi; dan pemanfaatan ruang dan waktu. All4Ed menyediakan konsultasi, sumber daya, dan acara yang mendorong inovasi dan kolaborasi digital (Ray dan Trettin 2016).³¹⁸

Pustakawan sekolah dengan cepat menyadari keselarasan antara pendekatan Future Ready Schools (FRS) dengan nilai-nilai American Association of School Librarians (AASL). Kolaborasi dengan All4Ed dan Departemen Pendidikan menghasilkan inisiatif Future Ready Librarians (FRL) pada Juni 2016, yang didukung oleh Follett Publishing. FRL mengembangkan Kerangka Pustakawan Siap Masa Depan yang sejalan dengan kerangka FRS, membantu pustakawan memimpin, mengajar, dan mendukung sekolah berdasarkan komponen berbasis penelitian yang ditetapkan oleh FRS (Ray, 2018, hal. 10).³¹⁹

Tujuan FRL adalah mendorong keterlibatan antara pustakawan dan pemimpin sekolah, mempromosikan penilaian diri yang cermat, mengidentifikasi keterampilan pustakawan yang relevan, mendorong inovasi dalam program

³¹⁷ FRS (Future Ready Schools). 2019a. “Who We Are.” <https://futureready.org/who-we-are>.

³¹⁸ Ray, M., & Trettin, S. (2016). Librarians connected to national Future Ready initiative. *Teacher Librarian*, 44(1), 8.

³¹⁹ Ray, M. (2018). Why Do We Need Future Ready Librarians? That Kid. *Knowledge Quest*, 46(4), 8-12.

perpustakaan, dan menghubungkan kegiatan perpustakaan dengan tujuan distrik sekolah (Ray, 2018; Ray & Trettin, 2016). All4Ed mengakui peran penting pustakawan sekolah dalam FRS dengan tiga cara: *memberdayakan siswa dengan keterampilan dan literasi, berkolaborasi untuk praktik inovatif, dan memastikan kesempatan belajar yang adil* (FRS, 2019c).

Johnston (2011) menekankan peran penting pustakawan sekolah dalam mengintegrasikan teknologi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21. Pustakawan sekolah memfasilitasi penggunaan teknologi sebagai alat belajar, mempersiapkan siswa untuk sukses dalam masyarakat digital. (hal. 2)³²⁰

Pelajaran yang dapat diambil untuk perpustakaan sekolah Indonesia adalah:

1. Pentingnya literasi digital: Perpustakaan sekolah perlu fokus pada pengembangan literasi digital siswa, termasuk keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dan etis.
2. Integrasi teknologi: Perpustakaan sekolah harus mengintegrasikan teknologi ke dalam program dan layanan mereka, menyediakan akses ke sumber daya digital, dan memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi.
3. Kolaborasi: Pustakawan sekolah perlu berkolaborasi dengan guru dan pemimpin sekolah untuk mengembangkan program pembelajaran yang terintegrasi dan relevan dengan kurikulum.
4. Pengembangan profesional: Pustakawan sekolah perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang teknologi dan pedagogi untuk mendukung pembelajaran siswa secara efektif.
5. Advokasi: Pustakawan sekolah harus menjadi advokat untuk peran penting perpustakaan sekolah dalam pendidikan dan memastikan bahwa perpustakaan memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran siswa.

Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada teknologi dan kolaborasi, perpustakaan sekolah di Indonesia dapat mempersiapkan siswa untuk sukses di abad ke-21 dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang lebih luas.

6.10 Masalah Dalam Anggaran

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengamanatkan alokasi minimal 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan (Pasal 23 ayat 6). Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang krusial untuk memastikan ketersediaan anggaran yang memadai bagi perpustakaan sekolah, mendorong peningkatan prioritas perpustakaan dalam penganggaran sekolah, dan meningkatkan kesadaran semua pihak akan peran penting perpustakaan dalam pendidikan.

³²⁰ Johnston, M. P. (2011). School librarians as technology integration leaders: Enablers and barriers to leadership enactment. PhD diss., Florida State University.

Fleksibilitas ini sejalan dengan amanat UU No. 43 Tahun 2007 dan memungkinkan sekolah mengoptimalkan pengembangan perpustakaan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Sekolah di daerah terpencil, misalnya, dapat mengalokasikan dana BOS lebih besar untuk memperkaya koleksi dan menyediakan fasilitas memadai.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 63 Tahun 2023 juga turut mendukung pengembangan perpustakaan sekolah, terutama dalam aspek digitalisasi. Pasal 37 dan 42 Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 menyebutkan bahwa komponen penggunaan dana BOS dapat dialokasikan untuk digitalisasi sekolah, termasuk pengadaan buku digital dan pengembangan sistem perpustakaan digital. Hal ini sejalan dengan kebutuhan perpustakaan sekolah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menyediakan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas bagi siswa dan guru.

Oleh karena itu, selain dukungan regulasi dan fleksibilitas anggaran, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah dalam mengelola anggaran secara efektif, serta meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya perpustakaan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, perpustakaan sekolah dapat menjadi pusat sumber belajar yang berkualitas dan berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

6.10.1 Peran Kepala Sekolah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 23 Ayat (6) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 83 huruf f mewajibkan sekolah/madrasah untuk mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Peraturan PNRI Nomor 7 Tahun 2020 menekankan pentingnya pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan peraturan-peraturan ini, dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah terkait masalah anggaran perpustakaan sekolah adalah:

1. Memastikan alokasi anggaran minimal 5% dari anggaran belanja operasional atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
2. Menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk pengembangan perpustakaan, termasuk pengadaan buku, peningkatan fasilitas, dan pelatihan pustakawan.
3. Memastikan perpustakaan sekolah memenuhi standar nasional perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 84 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun tidak ada sanksi yang secara eksplisit ditujukan kepada kepala sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 86 menyebutkan bahwa sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 83, termasuk kewajiban alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, dapat dikenai sanksi administratif. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat berdampak pada pemberian bantuan atau penilaian kinerja sekolah.

6.10.2 Peran Pustakawan Sekolah

. Peran pustakawan sekolah dalam pengelolaan anggaran perpustakaan sangatlah krusial. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan terkait, peran ini dapat diimplikasikan dari berbagai peraturan yang ada. Pustakawan sekolah berperan dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi anggaran perpustakaan. Mereka memberikan masukan terkait kebutuhan buku, peralatan, dan pelatihan, serta memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Peran pustakawan sekolah dalam masalah anggaran dapat diimplikasikan dari beberapa peraturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (8): Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan tentu mencakup aspek pengelolaan anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (1): Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Ini menunjukkan bahwa pustakawan memiliki peran penting dalam pengelolaan perpustakaan, termasuk pengelolaan anggaran.
3. Peraturan PNRI Nomor 7 Tahun 2020: Peraturan ini menekankan pentingnya pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Pustakawan sekolah dapat berperan dalam memastikan bahwa anggaran perpustakaan digunakan untuk memenuhi standar tersebut.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tidak secara khusus membahas peran pustakawan sekolah dalam masalah anggaran, namun memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk yang dialokasikan untuk perpustakaan. Dalam hal ini, pustakawan sekolah dapat berperan sebagai mitra kepala sekolah dalam mengelola anggaran perpustakaan.

Selain itu, pustakawan sekolah juga dapat berperan dalam sejumlah aktivitas sebagai berikut:

1. Membangun Jaringan Kerjasama: Pustakawan dapat meningkatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan dengan aktif membangun jaringan kerjasama dengan pustakawan dari sekolah lain atau lembaga perpustakaan lainnya (Shaw, D. (1994).³²¹
2. Memprioritaskan Pemeliharaan dan Peningkatan Efisiensi: Pustakawan dapat berperan dalam menjaga fasilitas perpustakaan dan menggunakan sumber daya dengan efisien (Bouncken et al. , 2015).³²² Pemeliharaan rutin, perbaikan kecil, dan pengelolaan energi yang baik dapat memperpanjang umur fasilitas dan peralatan, mengurangi biaya perbaikan besar dalam jangka panjang.
3. Melibatkan Komunitas Sekolah dan Orang Tua: Pustakawan dapat melibatkan komunitas sekolah dan orang tua dalam kegiatan perpustakaan. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya di sekolah, pustakawan dapat mengundang partisipasi orang tua dan komunitas sekolah dalam acara-acara seperti bazaar buku, pertunjukan baca puisi, atau pertemuan dengan penulis. Partisipasi mereka dapat membantu dalam penggalangan dana atau donasi buku untuk perpustakaan (Posey-Maddox et al. , 2014).³²³
4. Mengoptimalkan Teknologi dan Sumber Daya Digital: Memanfaatkan teknologi dan sumber daya digital dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan aksesibilitas (Freidus, A. (2019).³²⁴ Kerjasama dengan penerbit atau platform digital untuk mendapatkan akses ke e-book atau jurnal elektronik dapat menjadi alternatif yang hemat biaya. Teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan inventaris, peminjaman buku, dan promosi perpustakaan.
5. Menyelenggarakan Program Pengembangan Perpustakaan: Pustakawan dapat menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan untuk staf dan guru terkait pengelolaan anggaran perpustakaan. Ini dapat mencakup pelatihan tentang pengadaan buku yang efisien, manajemen anggaran, dan strategi penggalangan dana. Dengan meningkatkan pemahaman kolektif tentang pengelolaan anggaran perpustakaan, pustakawan dapat memperkuat upaya

³²¹Shaw, D. (1994). *The impact of school library media centers on academic achievement*: Lance, Keith Curry, Welborn, Lynda & Hamilton-Pennell, Christine Castle Rock, CO: Hi Willow Research and Publishing, 1992. 125 pp. \$25.00 (ISBN 0-931510-48-1) Reviewed by Carol A. Doll, Associate Professor, Graduate School of Library and Information Science, 133 Suzallo Library, FM-30, University of Washington, Seattle, Washington 98195. *Library & Information Science Research*, 16(2), 188-189.

³²² Bouncken, R. B., Komorek, M., & Kraus, S. (2015). Crowdfunding: The current state of research. *International Business & Economics Research Journal*, 14(3), 407-416.

³²³ Posey-Maddox, L., Kimelberg, S. M., & Cucchiara, M. (2014). Middle-class parents and urban public schools: Current research and future directions. *Sociology Compass*, 8(4), 446-456.

³²⁴Freidus, A. (2019). "A great school benefits us all": Advantaged parents and the gentrification of an urban public school. *Urban Education*, 54(8), 1121-1148.

- untuk memperoleh dana tambahan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada (Power & Taylor, 2018)³²⁵
6. Pengelolaan Koleksi: Pustakawan berperan dalam mengelola koleksi perpustakaan dengan memahami kebutuhan dan minat pengguna perpustakaan. Dengan memilih buku dan sumber belajar yang relevan dan bervariasi, pustakawan dapat meningkatkan nilai pendidikan yang diberikan oleh perpustakaan, serta membantu dalam mendapatkan alokasi anggaran yang memadai (Kubik et al. , 2009).
 7. Menjelajahi Sumber Daya Eksternal: Pustakawan berperan dalam membangun hubungan dengan komunitas dan pihak eksternal. Pustakawan dapat mencari dan memanfaatkan sumber daya eksternal seperti donatur, sponsor, yayasan, atau program bantuan pemerintah yang dapat memberikan dukungan finansial, sumbangan buku, atau fasilitas lain untuk perpustakaan. Dengan mengembangkan kemitraan dan jaringan dengan pihak eksternal, pustakawan dapat membantu mendapatkan dana tambahan untuk perpustakaan (Murray et al. , 2019).³²⁶
 8. Pengelolaan Anggaran: Pustakawan berperan dalam mengelola anggaran perpustakaan dengan bijaksana. Pustakawan dapat membantu kepala sekolah atau manajemen sekolah dalam perencanaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan prioritas kebutuhan perpustakaan. Dengan mengelola anggaran secara efisien, pustakawan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan menunjukkan nilai penting perpustakaan sebagai pusat pembelajaran (Gee, 2010)³²⁷
 9. Program Penggalangan Dana: Pustakawan dapat mengembangkan dan mengorganisir program penggalangan dana kreatif, seperti bazaar buku, lelang amal, atau kampanye donasi. Dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekolah, upaya penggalangan dana ini dapat menghasilkan dana tambahan untuk perpustakaan (Burgin & Hirsh, 2007).³²⁸
 10. Pustakawan sekolah disarankan untuk fokus pada empat area utama: memastikan akses yang sama ke buku untuk meningkatkan keterampilan membaca, memberikan kontribusi substantif terhadap kurikulum dan pengajaran, mempromosikan keterlibatan siswa yang tinggi dan pembelajaran yang dipersonalisasi, serta mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan

³²⁵ Power, S., & Taylor, C. (2018). The mainstreaming of charities into schools. *Oxford Review of Education*, 44(6), 702-715.

³²⁶ Murray, B., Domina, T., Renzulli, L., & Boylan, R. (2019). Civil society goes to school: Parent-teacher associations and the equality of educational opportunity. *RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences*, 5(3), 41-63.

³²⁷ Gee, L. K. (2011). The nature of giving time to your child's school. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 40(3), 552-565.

³²⁸ Burgin, R., & Hirsh, S. G. (2007). Fundraising for school libraries. *Libraries Unlimited*.

koleksi untuk membantu guru menghadapi lingkungan informasi yang kompleks (Ahlfeld, 2019)³²⁹

11. Meningkatkan Kesadaran Nilai Perpustakaan: Pustakawan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan melalui program promosi, seminar, atau kegiatan lainnya. Dengan mengedukasi tentang manfaat perpustakaan dalam meningkatkan literasi, pengetahuan, dan keterampilan siswa, pustakawan dapat meningkatkan dukungan dan alokasi anggaran untuk perpustakaan (Todd, 2003).³³⁰

6.10.3 Peran Guru Sekolah

Guru sekolah juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah anggaran perpustakaan sekolah. Berikut adalah beberapa peran yang dapat diambil oleh guru:

1. Advokasi untuk Perpustakaan: Guru dapat secara aktif mendukung perpustakaan sekolah dan menjadikannya bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan mempromosikan manfaat perpustakaan dan menunjukkan dampak positifnya terhadap pembelajaran siswa, guru dapat membantu meningkatkan prioritas perpustakaan dalam alokasi anggaran sekolah (Lowe et al. , 2015).³³¹
2. Penggunaan Sumber Daya Perpustakaan Secara Efisien: Guru dapat memanfaatkan sumber daya perpustakaan secara efisien dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pelajaran. Dengan menggunakan buku, media, dan materi lain yang tersedia di perpustakaan, guru dapat mengurangi kebutuhan untuk membeli sumber daya tambahan. Selain itu, guru dapat berkolaborasi dengan pustakawan untuk mengembangkan kurikulum yang terkait dengan koleksi perpustakaan yang ada (Swartz et al. , 2007).³³²
3. Mengorganisir Kegiatan Kolaboratif: Guru dapat berkolaborasi dengan pustakawan dan staf perpustakaan untuk menyelenggarakan kegiatan bersama yang dapat menghemat anggaran. Misalnya, guru dapat melakukan proyek penelitian atau kegiatan literasi yang melibatkan penggunaan sumber daya perpustakaan. Dengan bekerja sama, guru dan pustakawan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada tanpa mengeluarkan biaya tambahan (Schulte & Sherwill-Navarro, 2009).³³³

³²⁹ Ahlfeld, K. (2019). They paved paradise: School librarians and school libraries are disappearing and we won't know what we've lost until it's gone. *Journal of Library Administration*, 59(8), 927-938.

³³⁰ Todd, R. J. (2003). Evidence-based practice and school library media programs. *Library Media Connection*, 22(3), 6-9.

³³¹ Lowe, M. S., Booth, C., Stone, S., & Tagge, N. (2015). Impacting information literacy learning in first-year seminars: A rubric-based evaluation. *portal: Libraries and the Academy*, 15(3), 489-512.

³³² Swartz, P. S., Carlisle, B. A., & Chisato Uyeki, E. (2007). Libraries and student affairs: partners for student success. *Reference Services Review*, 35(1), 109-122.

³³³ Schulte, S. J., & Sherwill-Navarro, P. J. (2009). Nursing educators' perceptions of collaboration with librarians. *Journal of the Medical Library Association: JMLA*, 97(1), 57.

4. Mengintegrasikan Literasi ke dalam Pembelajaran: Guru dapat mengintegrasikan aspek literasi ke dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan. Dengan membangun keterampilan literasi siswa, guru dapat membantu meningkatkan kebutuhan dan minat terhadap perpustakaan. Hal ini dapat memengaruhi dukungan dan prioritas anggaran untuk perpustakaan sekolah (Toyasaki & Wakolbinger, 2018).³³⁴
5. Melibatkan Orang Tua dan Komunitas: Guru dapat melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya mendukung perpustakaan sekolah. Dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua, bermitra dengan organisasi komunitas, atau menyelenggarakan kegiatan sosial di perpustakaan, guru dapat membangun dukungan dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan serta mengumpulkan sumber daya tambahan (Brandenburg et al. , 2017).³³⁵
6. Memberikan Umpan Balik: Guru dapat memberikan umpan balik kepada pustakawan dan manajemen sekolah tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap perpustakaan. Dengan memberikan masukan yang membangun, guru dapat membantu memandu pengelolaan anggaran perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan kegiatan pembelajaran di sekolah (Merga, 2019).³³⁶

Dengan berperan aktif dan mendukung perpustakaan sekolah, guru dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi persoalan anggaran perpustakaan dan memastikan perpustakaan tetap menjadi sumberdaya yang berharga untuk siswa dan staf sekolah.

6.10.4 Peran Orang Tua

Keterlibatan orang tua dalam mendukung perpustakaan sekolah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi yaitu:

1. Orang tua dapat mendukung penggalangan dana: Mereka dapat berpartisipasi dalam acara penggalangan dana sekolah, seperti bazaar buku, atau memberikan sumbangan langsung (Sánchez et al. , 2012).³³⁷
2. Orang tua dapat menyumbangkan buku dan materi bacaan: Sumbangan buku dari orang tua dapat membantu memperkaya koleksi perpustakaan tanpa membebani anggaran sekolah (Kohl et al. , 2000)³³⁸

³³⁴ Toyasaki, F., & Wakolbinger, T. (2019). Joint fundraising appeals: allocation rules and conditions that encourage aid agencies' collaboration. *Decision Sciences*, 50(3), 612-648.

³³⁵ Brandenburg, M. D., Cordell, S. A., Joque, J., MacEachern, M. P., & Song, J. (2017). Interdisciplinary collaboration: Librarian involvement in grant projects. *College & Research Libraries*, 78(3), 272.

³³⁶ Merga, M. K. (2019). Collaborating with teacher librarians to support adolescents' literacy and literature learning. *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 63(1), 65-72.

³³⁷ Sánchez, V., Hale, R., Andrews, M., Cruz, Y., Bettencourt, V., Wexler, P., & Halasan, C. (2014). School wellness policy implementation: insights and recommendations from two rural school districts. *Health promotion practice*, 15(3), 340-348.

³³⁸ Kohl, G. O., Lengua, L. J., & McMahon, R. J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk factors. *Journal of school psychology*, 38(6), 501-523.

3. Orang tua dapat menjadi relawan di perpustakaan: Dengan menjadi relawan, orang tua dapat membantu dalam pengelolaan koleksi, pengaturan acara, atau membantu siswa dalam aktivitas perpustakaan, sehingga mengurangi beban kerja staf perpustakaan (Murray et al. , 2020).³³⁹
4. Orang tua dapat mendorong partisipasi siswa: Dengan mendorong anak-anak mereka untuk aktif menggunakan perpustakaan dan mengikuti kegiatan yang diadakan, orang tua dapat menunjukkan pentingnya perpustakaan dan kebutuhan akan dukungan yang memadai (Murray et al. , 2020).
5. Orang tua dapat menjadi advokat perpustakaan: Dengan berbicara kepada guru, staf sekolah, dan manajemen tentang pentingnya perpustakaan, orang tua dapat membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan untuk perpustakaan (Murray et al. , 2020).
6. Orang tua dapat terlibat dalam pengambilan keputusan: Partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan terkait anggaran perpustakaan dapat memastikan bahwa kebutuhan perpustakaan terwakili dan didukung (Kohl et al. , 2000)³⁴⁰

Pelajaran yang dapat diambil oleh orang tua di Indonesia adalah bahwa mereka memiliki peran penting dalam mendukung perpustakaan sekolah melalui berbagai cara, baik secara finansial, kontribusi sumber daya, maupun partisipasi aktif dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Dengan berperan aktif, orang tua dapat membantu meningkatkan kualitas dan layanan perpustakaan sekolah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak mereka.

6.10.5 Peran Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah sebuah lembaga yang memiliki anggota terdiri dari orangtua/wali murid, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, lembaga ini berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komite Sekolah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, serta kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.

³³⁹ Murray, B., Domina, T., Petts, A., Renzulli, L., & Boylan, R. (2020). "We're in this together": Bridging and bonding social capital in elementary school PTOs. *American Educational Research Journal*, 57(5), 2210-2244.

³⁴⁰ Kohl, G. O., Lengua, L. J., & McMahon, R. J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and their relations with family and demographic risk factors. *Journal of school psychology*, 38(6), 501-523.

2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik individu, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya yang kreatif dan inovatif.
3. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menanggapi keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, masyarakat, serta hasil pengamatan Komite Sekolah terhadap kinerja sekolah

Komite Sekolah dapat melakukan beberapa peran dalam mengatasi persoalan anggaran yang dihadapi oleh sekolah. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah:

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS):
2. Komite Sekolah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan anggaran sekolah. Mereka dapat membantu menentukan alokasi anggaran yang efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat:
4. Komite Sekolah dapat melakukan upaya kreatif dan inovatif dalam mengumpulkan dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat. Mereka dapat melakukan kampanye penggalangan dana, menjalin kerjasama dengan perorangan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri untuk mendapatkan dukungan keuangan dan sumber daya lainnya guna memenuhi kebutuhan anggaran sekolah.
5. Mengawasi pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan:
6. Komite Sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggaran, mereka dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran sekolah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat:
8. Komite Sekolah juga bertugas untuk menanggapi keluhan, saran, kritik, dan aspirasi yang datang dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat terkait anggaran sekolah. Mereka dapat melakukan pengawasan terhadap pengguna

Dengan berperan aktif dan mendukung perpustakaan sekolah, orang tua dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menghadapi persoalan anggaran dan memastikan perpustakaan tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi siswa. Partisipasi aktif orang tua, seperti menjadi sukarelawan di perpustakaan, mengumpulkan dana, dan mengadvokasi pentingnya

perpustakaan kepada pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya, dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan keberlanjutan layanan perpustakaan. Keterlibatan orang tua juga dapat memperkuat hubungan antara perpustakaan, sekolah, dan komunitas, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya dan mendukung bagi siswa.

6.11 Persoalan Sensorship

Sensitivitas terhadap sensorship di perpustakaan sekolah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat. Kebijakan sensorship di perpustakaan sekolah biasanya ditetapkan untuk memastikan bahwa materi yang tersedia sesuai dengan nilai-nilai dan standar yang dipegang oleh lembaga pendidikan (Baro et al. , 2019).³⁴¹ Pembatasan akses terhadap bahan-bahan tertentu sering dilakukan untuk melindungi siswa dari konten yang dianggap tidak pantas atau kontroversial (Ayuningtyas, 2023). Namun, hal ini juga dapat menimbulkan kontroversi karena adanya perbedaan pendapat tentang kebebasan berpendapat dan akses informasi (Ayuningtyas, 2023).³⁴²

Proses sensorship di perpustakaan sekolah melibatkan komite sensorship yang terdiri dari berbagai pihak seperti guru, administrasi sekolah, dan orang tua (Ayuningtyas, 2023). Mereka bertugas mengevaluasi bahan yang dipertanyakan dan membuat keputusan apakah bahan tersebut harus tetap tersedia atau dihapus dari koleksi perpustakaan (Ayuningtyas, 2023). Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pandangan dan kebijakan sensorship dapat berubah seiring waktu, di mana beberapa perpustakaan sekolah menjadi lebih terbuka terhadap kebebasan berpendapat dan menyediakan akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis materi (Ayuningtyas, 2023)

Dalam konteks sensorship di perpustakaan sekolah, penting untuk memperhatikan bahwa pandangan dan kebijakan sensorship dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan standar yang dianut oleh masing-masing lembaga pendidikan (Baro et al. , 2019). Sementara sensorship dapat dianggap sebagai langkah perlindungan terhadap siswa dari materi yang tidak pantas, perlu juga dipertimbangkan bagaimana hal ini dapat memengaruhi kebebasan berpendapat dan akses informasi yang penting bagi proses pendidikan (Baro et al. , 2019).

6.11.1 Peran Perpustakaan Sekolah Dalam Aktivitas Sensorship

³⁴¹ Baro, E. E., Obaro, O. G., & Aduba, E. D. (2019). An assessment of digital literacy skills and knowledge-based competencies among librarians working in university libraries in Africa. *Digital Library Perspectives*, 35(3/4), 172-192.

³⁴² Ayuningtyas, A. A., Heriyanto, Irhandayaningsih, A., & Ganggi, R. I. P. (2023). School library censorship: Looking at the perspective of a school librarian association in Indonesia. *IFLA journal*, 49(3), 587-595.

Dalam konteks Indonesia, pandangan dan pendekatan terhadap peran perpustakaan sekolah dapat bervariasi. Beberapa poin yang dapat diperhatikan dalam menghubungkan sensorship dalam konteks perpustakaan sekolah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Keselamatan: Sekolah adalah pengasuh anak-anak dianggap memiliki kewajiban untuk melindungi mereka dari pengaruh yang tidak sehat dan merusak. Hal ini juga berlaku dalam konteks Indonesia, di mana orang tua dan pengajar dianggap bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa. (Rianti, F., & Dewakanya, S. D. (2018)³⁴³
2. Peran Sekolah: Secara hukum, sekolah di Indonesia juga berperan sebagai pengganti orang tua saat siswa berada di sekolah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan fisik dan emosional siswa. Namun, cara seseorang mendefinisikan tujuan sekolah dapat bervariasi, tergantung pada pendekatan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan lembaga pendidikan.
3. Penanaman Nilai: Di Indonesia, peran sekolah sering kali melibatkan penanaman nilai-nilai budaya, agama, dan moral yang dianut oleh masyarakat setempat. Ada keyakinan bahwa perpustakaan sekolah harus membatasi akses siswa terhadap materi yang dianggap melanggar nilai-nilai tersebut, atau setidaknya mengontrol akses ke materi yang dianggap tidak ortodoks. (Rianti, F., & Dewakanya, S. D. (2018)
4. Keterampilan Berpikir Kritis: Namun, ada juga pandangan bahwa perpustakaan sekolah harus menjadi sumber akses yang beragam untuk memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penilaian. Pustakawan berperan dalam mempromosikan literasi siswa, dan akses ke materi yang mencerminkan berbagai sudut pandang dianggap penting.

6.11.2 Peran Komite Sekolah

Komite Sekolah, sebagai lembaga yang mewakili orang tua, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat, memiliki peran penting dalam mengatasi masalah sensor di perpustakaan sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan terkait koleksi perpustakaan.

Berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menangani masalah sensor di perpustakaan sekolah:

1. Mengembangkan Kebijakan Seleksi yang Jelas dan Transparan: Komite Sekolah dapat bekerja sama dengan pustakawan dan pihak sekolah untuk mengembangkan kebijakan seleksi materi perpustakaan yang jelas, transparan, dan inklusif. Kebijakan ini harus didasarkan pada kriteria pendidikan yang

³⁴³ Rianti, F., & Dewakanya, S. D. (2018). Kebijakan dan penerapan censorship di perpustakaan sekolah Islam: studi kasus di Perpustakaan TK dan SD Insan Cendekia Madani. *Al Maktabah*, 17(1).

relevan, seperti usia dan tingkat perkembangan siswa, serta mempertimbangkan keragaman budaya dan pandangan dalam masyarakat.

2. Menyediakan Mekanisme Peninjauan yang Adil: Komite Sekolah dapat membentuk komite peninjau yang terdiri dari perwakilan guru, pustakawan, orang tua, dan siswa untuk menangani keluhan atau keberatan terhadap materi perpustakaan tertentu. Komite peninjau ini harus memiliki prosedur yang jelas dan adil dalam mengevaluasi materi yang dipertanyakan, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan intelektual dan hak siswa untuk mengakses beragam informasi.
3. Mendorong Diskusi Terbuka dan Dialog: Komite Sekolah dapat memfasilitasi diskusi terbuka dan dialog antara pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai masalah sensor. Dengan menciptakan ruang untuk diskusi yang saling menghormati, Komite Sekolah dapat membantu membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
4. Mendukung Komunitas Sekolah tentang Kebebasan Intelektual: Komite Sekolah dapat berperan dalam mendukung komunitas sekolah, termasuk orang tua, guru, dan siswa, tentang pentingnya kebebasan intelektual dan hak untuk mengakses informasi. Dengan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai ini, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya sensor yang tidak berdasar.
5. Melindungi Pustakawan dari Tekanan yang Tidak Semestinya: Komite Sekolah dapat berperan sebagai pelindung bagi pustakawan sekolah dari tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang ingin melakukan sensor terhadap koleksi perpustakaan. Komite Sekolah harus memastikan bahwa pustakawan dapat menjalankan tugas profesional mereka dalam menyeleksi dan menyediakan akses ke materi perpustakaan tanpa rasa takut atau intimidasi.

6. 11. 3. Peran Orang Tua dan Siswa

Orang tua juga memegang peran krusial dalam sensoship. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan keterampilan integrasi sensorik dan sosial-emosional anak-anak mereka. Mereka dapat terlibat dalam program-program yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti seminar atau pertemuan dengan para ahli, untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam mendukung anak-anak mereka (Zhang & Tang, 2019; Cohn, 2001).³⁴⁴

6.12 Peran Pustakawan Sekolah di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Masa Depan

Di era digital, peran pustakawan sekolah di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru yang signifikan. Pustakawan perlu memiliki kemampuan melek informasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi. Hal ini sejalan

³⁴⁴ Zhang, J., & Tang, M. (2020). The relationship between family environmental factors and child sensory integration. *Journal of Nursing Education and Practice*, 10(1).

dengan pandangan Ghazali (2021) yang menekankan pentingnya kompetensi literasi informasi dan teknologi bagi pustakawan dalam menghadapi era disrupsi.³⁴⁵

Inovasi layanan seperti "Delivery Service" yang diterapkan di beberapa perpustakaan sekolah (Pamungkas, 2022) menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan layanan, terutama dalam situasi pandemi seperti Covid-19. Pustakawan perlu mempertimbangkan solusi kreatif seperti ini untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi siswa dan guru.³⁴⁶

Pustakawan juga berperan penting dalam sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem informasi perpustakaan (Nilma et al. , 2022). Dengan meningkatkan literasi informasi di kalangan guru dan siswa, pustakawan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar.

Penerapan teknologi seperti Internet of Things (IoT) dalam sistem informasi dan manajemen perpustakaan (Wardihani & Sayekti, 2021) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan. Pustakawan perlu memahami dan mengimplementasikan teknologi ini untuk memenuhi kebutuhan pengguna di era digital.³⁴⁷

Selain itu, pustakawan perlu memperhatikan perubahan dalam gaya kepemimpinan kepala sekolah di era digital (Rosita & Iskandar, 2022). Kolaborasi antara pustakawan dan kepala sekolah dapat memperkuat peran perpustakaan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.³⁴⁸

Meskipun perpustakaan sekolah di Indonesia sering dipandang sebelah mata, perpustakaan sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong eksplorasi, kreasi, dan pemikiran kritis siswa melalui berbagai sumber daya daring (Miller, 2018). Pustakawan sekolah profesional juga dapat mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat dan membentuk warga negara yang baik melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Burns, 2018).³⁴⁹

Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi perpustakaan sekolah dengan mendorong penggunaan teknologi online (Ellis, 2020). Pustakawan sekolah kini mengambil peran baru sebagai penasihat teknis, kurator konten online, fasilitator klub buku virtual, dan penyedia berbagai layanan daring lainnya. Dampak

³⁴⁵ Ghazali, Z. (2020). Peluang Dan Tantangan Profesi Pustakawan Yang Melek Informasi Di Era Disrupsi. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 3(1), 38-56.

³⁴⁶ Pamungkas, A. H. (2022). Inovasi Layanan "Delivery Service" Pada Perpustakaan Sekolah di Era Pandemi Covid-19. *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 6(2), 160.

³⁴⁷ Wardihani, E. D., Supriyo, B., & Sayekti, I. (2021). Penerapan Sistem Informasi Dan Manajemen Perpustakaan Berbasis IoT Di SDN Kramas, Tembalang, Kota Semarang. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 7(1), 1-10.

³⁴⁸ Rosita, R., & Iskandar, S. (2022). Gaya kepemimpinan kepala sekolah di era digital. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6005-6011.

³⁴⁹ Burns, E. A. (2018). Advocating for change in school library perceptions. *Teacher Librarian*, 46(1).

jangka panjang dari perubahan ini masih belum pasti, tetapi perpustakaan sekolah akan tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, pustakawan sekolah di Indonesia perlu menunjukkan dampak positif perpustakaan terhadap pembelajaran siswa kepada para pemangku kepentingan di semua tingkatan. Mereka harus menjadi kurator yang efektif, mengembangkan program yang menarik, mempromosikan literasi, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata.

Zilonis dan Swerling (2018) mencatat bahwa perpustakaan sekolah telah mengalami transformasi signifikan dari pusat media menjadi pusat pembelajaran kolaboratif yang memberdayakan siswa untuk mengambil kendali atas pembelajaran mereka sendiri. Perpustakaan sekolah kini lebih berfokus pada peserta didik daripada koleksi, dengan pustakawan sekolah berperan sebagai mitra pembelajaran yang dinamis. (hal. 25)³⁵⁰

Siswa memiliki peran penting dalam pengembangan integrasi sensorik dan pembelajaran sosial-emosional. Siswa perlu terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan ini. Mereka dapat melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti sesi terapi sensorik, latihan keterampilan sosial, kegiatan kelompok, dan interaksi dengan teman sebaya

³⁵⁰ Zilonis, Mary Francis, and Chris Swerling. 2018. "On Common Ground: Getting to Know the (NEW!) AASL Standards—Part 2." *School Library Connection* (May/June): 25

4. Peran Aktif dalam Open Science: PDDI LIPI dapat berperan aktif dalam gerakan *open science* dengan menyediakan akses terbuka terhadap data penelitian dan mempromosikan praktik penelitian terbuka.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dalam konteks pandemi, PDDI LIPI telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk tetap memberikan layanan kepada pengguna melalui berbagai platform daring (Rizzal Rosiyan & Maha, 2020).

Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, PDDI LIPI memiliki landasan yang kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna di era digital. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat diatasi dengan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga penelitian lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas akses terhadap sumber daya, tetapi juga memperkaya perspektif dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan yang lebih inovatif dan relevan.

PDDI LIPI juga perlu terus mengembangkan kompetensi pustakawan dan stafnya agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini dalam pengelolaan informasi ilmiah. Pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan akan memastikan bahwa PDDI LIPI memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selain itu, PDDI LIPI dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanannya. Pengembangan platform digital yang terintegrasi, seperti sistem pencarian yang canggih, repositori data penelitian yang mudah diakses, dan layanan referensi online yang responsif, akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi ilmiah.

Dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanannya, PDDI LIPI dapat memperkuat posisinya sebagai pusat informasi ilmiah terkemuka di Indonesia, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih berpengetahuan dan inovatif.

BIODATA PENULIS



Dr. Jamridafrizal, S.Ag., S.S., M.Hum. adalah seorang dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan, teknologi pendidikan, dan pendidikan agama Islam, dengan gelar S3 dari Universitas Negeri Jakarta, S2 dari Universitas Indonesia, dan S1 ganda dari IAIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Penulis pernah menjabat sebagai Ketua IPI Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten. Karya ilmiahnya mencakup berbagai topik terkait perpustakaan dan teknologi pendidikan, dengan publikasi di jurnal internasional dan nasional.

Selain mengajar, Jamridafrizal aktif sebagai narasumber dan moderator dalam berbagai seminar dan lokakarya tingkat nasional dan provinsi. Penulis juga menjadi juri dalam pemilihan pustakawan berprestasi dan lomba perpustakaan sekolah. Kontribusinya dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi Islam sangat signifikan, terutama di Provinsi Banten.



Zulfitri, S.Ag., MA adalah seorang pustakawan ahli madya di UPT Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu perpustakaan dan tafsir hadis, dengan gelar S2 dari IAIN Imam Bonjol Padang dan sedang menempuh pendidikan S3 di UIN Imam Bonjol Padang.

Zulfitri aktif terlibat dalam organisasi profesi pustakawan, termasuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), FPPTI Sumatera Barat, dan APPTIS. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan saat ini menjabat sebagai Koordinator Layanan Referensi. Zulfitri juga aktif sebagai tim penilai dalam lomba pustakawan dan perpustakaan tingkat Sumatera Barat.

Selain bekerja sebagai pustakawan, Zulfitri juga memiliki pengalaman sebagai pengajar dan dosen luar biasa di IAIN Imam Bonjol Padang. Kontribusinya dalam bidang perpustakaan dan keilmuan Islam sangat signifikan, terutama di Sumatera Barat



Muhammad Farid Wajdi, S.Si, S.IPI, M.Hum adalah dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyelesaikan Pendidikan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Yarsi Jakarta dan Fisika Universitas Indonesia.

Penulis aktif terlibat dalam organisasi profesi perpustakaan. Penulis pernah menjadi pengurus Ikatan Pustakawan Provinsi Banten dan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi Banten, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Provinsi Banten serta aktif sebagai pengurus Asosisasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS).